

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK

**DAMPAK PENGGUNAAN SIKEUDA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN**

(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)



DISUSUN OLEH :

DESIANA SARAGIH

1412120106

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK (KP)

**DAMPAK PENGGUNAAN SIKEUDA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN**

(Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

Oleh :

Desiana Saragih

1412120106

Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Mengetahui

Dosen Pembimbing


Ulfah Tika Saputri, S.E.,M.Sc

NIK.15051219

Pengantar Lapangan


Nasrobi Sugara, S.T

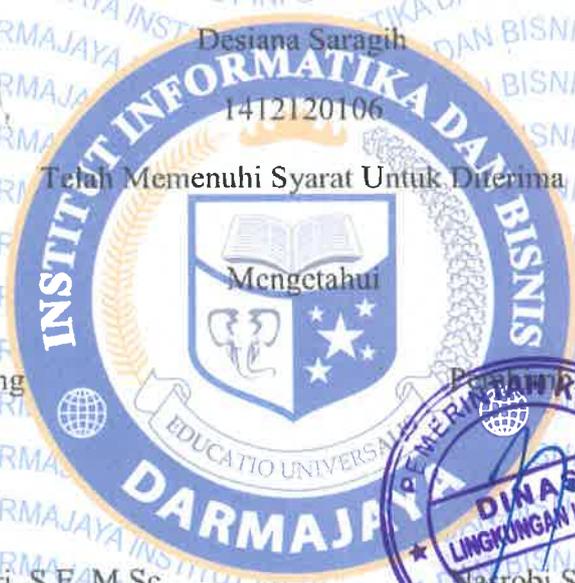
NIK.19750309 200604 1 005

Menyetujui,

Ketua Jurusan Akuntansi


Toni Nurhadianto, S.E.,M.Sc

NIK. 14900319



RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

- a. Nama : Desiana Saragih
- b. NPM : 1412120106
- c. Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 22 Mei 1996
- d. Agama : Kristen Protestan
- e. Alamat : Jl. Pangeran Antasari Gg Man 1
- f. Kewarganegaraan : Indonesia
- g. E-Mail : Desianasaragihsiadari@gmail.com
- h. Handphone : 0812-7223-5755

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD Xaverius 3 Bandar Lampung
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMP Nusantara Bandar Lampung
- c. Sekolah Menengah Atas : SMAN 5 Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan diatas adalah benar .

Yang Menyatakan

Bandar Lampung, 27 September 2021



Desiana Saragih

NPM. 1412120106

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“Dampak Penggunaan Sikeuda Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”** Sesuai dengan yang di rencanakan. Laporan ini disusun guna untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021.

Dalam melakukan penyusunan laporan ini, saya sangat sadar sepenuhnya bahwa laporan Kerja Praktek (KP) ini tidak lepas dari bimbingan, semangat, serta dukungan dari banyak pihak , maka dari itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- 1 Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA.,M.Sc selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
- 2 Bapak Toni Nurhadianto. S.E.,M.Sc selaku Ketua Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
- 3 Ibu Ulfah Tika Saputri. S.E.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
- 4 Bapak Sahriwansyah S.E selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- 5 Bapak Nasrobi Sugara. S.T selaku Kassubag Umum dan Kepegawaian dan yang sudah menjadi Pembimbing Instansi.
- 6 Seluruh pemangku kepentingan & Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
- 7 Keluarga serta teman-teman yang memberikan semangat dan dukungan.

Penyusunan Laporan Kerja Praktek ini disusun dengan sebaik – baiknya, tetapi masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat saya harapkan. Dan harapan saya laporan Kerja Praktek ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 24 September 2021

Penulis



Desiana Saragih

NPM.1412120106

DAFTAR ISI

JUDUL LAPORAN	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RIWAYAT HIDUP.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Program Kerja Praktek.....	4
1.3 Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek	4
1.3.1 Manfaat Program KerjaPraktek.....	4
1.3.2 Tujuan Program Kerja Praktek	5
1.4 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Perusahaan.....	7
2.2 Visi Dan Misi	8
2.2.1 Visi Perusahaan	8
2.2.2 Misi Perusahaan.....	8
2.3 Kegiatan Utama Perusahaan.....	8
2.4 Lokasi Perusahaan	9
2.5 Struktur Organisasi.....	9
BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN	
3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan	
3.1.1 Temuan Masalah	10
3.1.2 Perumusan Masalah.....	10
3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah.....	10

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Sistem	11
3.2.2 Informasi	12
3.2.3 Sistem Informasi	12
3.2.4 Pengertian Sikeuda	12
3.2.5 Manfaat Analisis Sikeuda.....	14
3.2.6 Keunggulan Sikeuda	14
3.2.7 Teknologi Yang digunakan Sikeuda	15
3.2.8 Tahap yang diperlukan Pengisian Sikeuda.....	16

3.3 Metode Yang Akan Digunakan..... 16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil	17
4.1.1 Dampak Penggunaan Sikeuda	17
4.2 Pembahasan.....	19

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	25
5.2 Saran.....	25

DAFTAR PUSTAKA 27

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	9
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	11
Gambar 4.1 Tampilan Awal	19
Gambar 4.2 Halaman Dashboard Login Sikeuda.....	20
Gambar 4.3 Beranda Aplikasi Sikeuda	20
Gambar 4.4 Isi Modul Penatausahaan.....	21
Gambar 4.5 Tampilan Pengisian SPD.....	21
Gambar 4.6 Tampilan Pengisian SPP	22
Gambar 4.7 Tampilan Pengisian SPM.....	22
Gambar 4.8 Tampilan Pengisian SP2D.....	23
Gambar 4.9 Tampilan Pengisian SPJ	23
Gambar 5.0 Mengisi Buku Laporan.....	24
Gambar 5.1 Tampilan Laporan Akhir	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu (Hutahaean (2015:2). Sedangkan menurut Mulyadi (2016:2) menyatakan bahwa “sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya”. Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli bahwa sistem adalah suatu kumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan output dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2007. Atas dasar tersebut pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait

Setiap perusahaan Swasta , BUMN , Usaha dan Instansi Pemerintahan, membutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya. secara garis besar manajemen terbagi menjadi 4 yaitu, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional dan, manajemen pemasaran. Salah satu bidang yang membutuhkan ketelitian dan efektif ialah pada bidang Manajemen keuangan, perencanaan keuangan dan pelaksanaan pengeluaran dana yang tepat dan efektif memungkinkan suatu perusahaan berjalan dengan baik.

Sistem sudah masuk disegala bentuk lembaga salah satunya Sikeuda. Sikeuda adalah kepanjangan dari Sistem informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi yang artinya Sistem informasi keuangan sering dibutuhkan dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam perusahaan, terutama masalah keuangan karena Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKEUDA) sesuai dengan UU 33/2004 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Mengenai sistem informasi keuangan daerah diatur agar supaya menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Sikeuda sangat dibutuhkan bagi Instansi Pemerintahan atau Perusahaan karena manfaat yang dapat dirasakan dalam penggunaan sikeuda adalah dapat membantu sumber daya manusia dalam meminimalisir waktu dan mempermudah pengerjaan laporan keuangan yang tersedia setiap bulan oleh Instansi yang bersangkutan untuk diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai laporan khusus bagaimana Insatnsi tersebut melaksanakan tugasnya.

Sistem lama yang dilakukan secara konvensional atau sering disebut Manual mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem komputerisasi, yang dirasa lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan data keuangan yang di peroleh, dan mudah dipahami, berbeda dengan sistem manual yang sudah ditinggalkan sangat membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama dalam mengerjakan data pengelolaan keuangannya karena masih menggunakan Microsoft Excel dimana pengerjaan tersebut dimulai dari awal atau tidak mempunyai format khusus dan dibuat sendiri oleh pegawai divisi keuangan, setelah hasil laporan sudah tercetak maka pegawai Instansi wajib mengirimkan secara langsung kepada Pemerintah Pusat. Berbeda halnya dengan menggunakan sikeuda hanya menggunakan tenaga dan konsentrasi yang jernih dalam penginputan dengan format yang langsung tersedia oleh pusat maka hasil yang diperoleh pun dapat diterima langsung oleh pemerintah pusat tanpa menunggu berkas yang dikirimkan oleh Instansi.

Jika instansi ingin dapat berkembang maka harus mampu mengimbangnya dengan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dalam bidang akuntansi agar dapat mempertahankan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam pengelolaan data keuangan secara baik. Hal tersebut menjadi sedemikian berkembang karena ditunjang dengan penyediaan komputer atau perangkat keras yang sekarang ini secara mudah didapatkan. Berdasarkan permasalahan saat ini maka Dinas Lingkungan Hidup berusaha menyajikan data keuangan yang tepat dengan sistem sikeuda dengan beberapa dampak yang dirasakan.

Oleh karna itu penulis ingin menyampaikan apa saja yang dirasakan bidang pengelolaan keuangan yang ada di dinas lingkungan hidup setelah

menggunakan sikeuda dengan judul laporan Dampak Penggunaan Sikeuda terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup)

1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerja praktek ini ada pada Divisi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola semua bagian-bagian data keuangan yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran .

1.3 Manfaat dan Tujuan

1.3.1 Manfaat Program Kerja Praktek

Manfaat yang diperoleh dari Program Kerja Praktek ini antara lain :

- 1) Bagi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
 - a. Memberikan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dalam dunia kerja.
 - b. Menjadi pengembangan mahasiswa dalam rasa tanggung jawab didalam lingkup dunia kerja.
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan wawasan berfikir dalam melakukan perumusan dan pemecahan masalah dalam lingkungan dunia kerja.
- 2) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
 - a. Dapat menjalin hubungan yang baik antara Instansi / Perusahaan dengan lembaga Perguruan Tinggi.
 - b. Dapat terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak – pihak yang terlibat.

1.3.2 Tujuan program kerja praktek

Tujuan yang diperoleh dari program kerja praktek ini adalah :

1. Memberikan wawasan kepada mahasiswa didalam lingkungan pekerjaan,
2. Memberikan pengalaman yang sebenarnya didalam lingkungan pekerjaan.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan program kerja praktek ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 s/d 16 September 2021 dengan mengikuti waktu kerja di Dinas Lingkungan Hidup pada :

Hari : Senin – Jumat

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Alamat : Jl. Pulau Sebesi No.89 Sukarame , Bandar Lampung

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang, ruang lingkup kerja, tujuan dan manfaat program kerja praktek, tempat dan waktu pelaksanaan program kerja praktek, sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini terdapat sejarah perusahaan, visi dan misi , kegiatan utama perusahaan , lokasi perusahaan , struktur perusahaan.

BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai yang terjadi di perusahaan, temuan masalah, perumusan masalah, serta kerangka pemecahan masalahnya. Dan bab ini berisi tentang teori – teori yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari permasalahan perusahaan tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran untuk perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya bernama Bapedalda merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung kemudian dirubah menjadi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dan memiliki divisi pencemaran lingkungan yang dapat memantau tingkat pencemaran yang di sebabkan kegiatan pembangunan atau usaha suatu kegiatan makhluk hidup di sekitar lingkungan Kota Bandar Lampung. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung yang beralamat di jalan pulau sebesi No 89 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Namun, pada tahun 2016 BPPLH berubah kembali namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang merupakan gabungan antara BPPLH dan Dinas Kebersihan dan pertamanan hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bandar Lampung serta Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung merupakan suatu lembaga teknis pelaksana tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi Instansi / Perusahaan

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang di tuangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah : “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.”

2.2.2 Misi Instansi / Perusahaan

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung masuk ke dalam misi ke- 3 Walikota Bandar Lampung yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung yaitu : “ Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan sosial”.

2.3 Kegiatan Utama Instansi / Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Instansi Pemerintah Kota yang mempunyai kegiatan :

1. Melakukan pemilahan dan pemisahan sampah serta menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
2. Melakukan konservasi air dengan cara menyiram tanaman taman kota di Bandar Lampung
3. Melakukan Penebangan dan Penghijauan Kembali di Bandar Lampung;
4. Giat melakukan pembersihan Lingkungan Kota Bandar Lampung
5. Giat pembersihan dan pemotongan rumput
6. Penarikan Retribusi dan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan kota

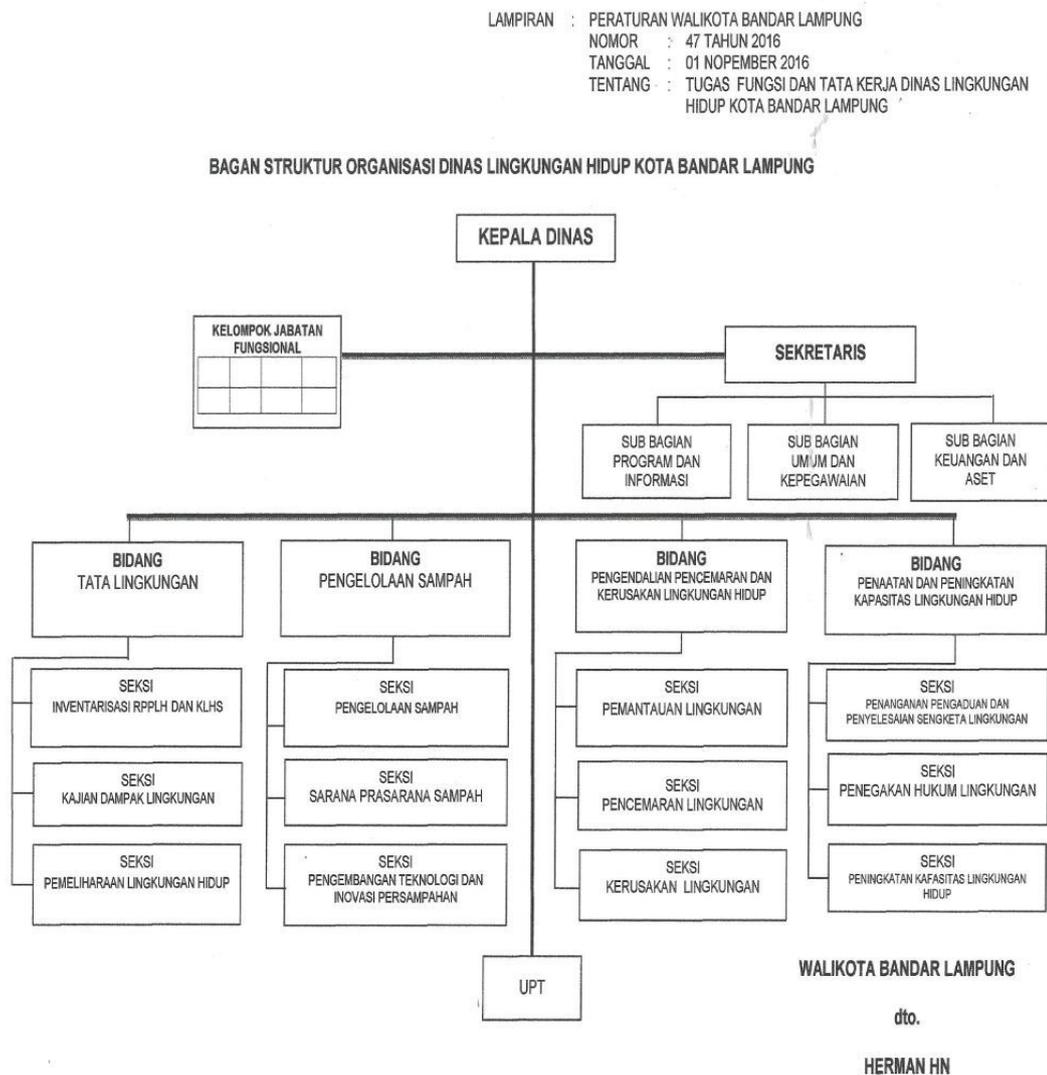
2.4 Lokasi Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertempat di Jl. Pulau Sebesi No.89 Sukarame Bandar Lampung

2.5 Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung



BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan

3.1.1 Temuan Masalah

Temuan masalah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kecepatan waktu dalam memperbaiki sistem yang sering mengalami kesalahan login.
- b. Kurangnya konfirmasi hubungan antara kesalahan penginputan dan pemerintah daerah.

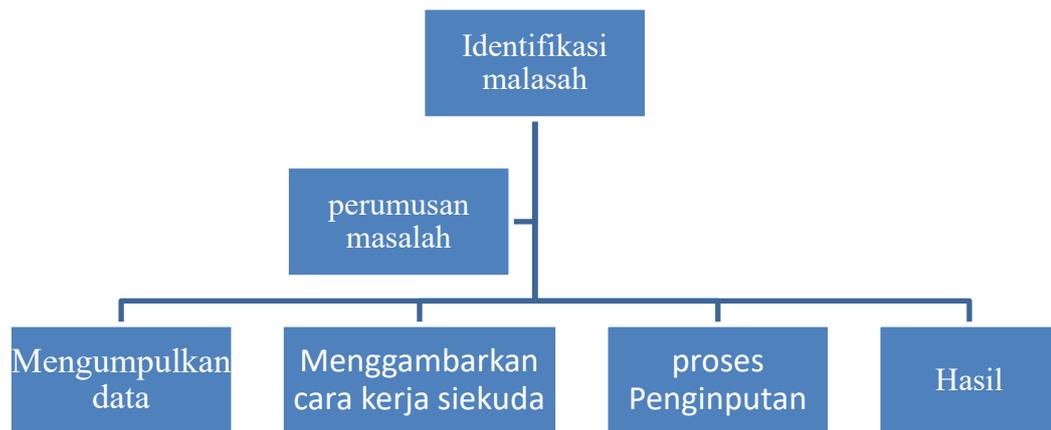
3.1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan di bahas pada laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sikeuda sebagai sistem keuangan daerah dapat membantu tugas pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah kualitas layanan pada Sikeuda dapat mempermudah tugas pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup ?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditunjukkan seperti tujuan penulis dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :



Gambar 3.1
Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Sistem

Sistem sangat penting bagi setiap Perusahaan swasta maupun Instansi Pemerintah karena dengan adanya sistem dapat membantu meringankan waktu dan mempermudah pekerjaan selain dari mengikuti perkembangan jaman saat ini, Sistem juga memiliki definisi Menurut Winanti (2014), Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Edhy Sutanta (2014), Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya sistem dapat dibuktikan bahwasannya sistem mempunyai manfaat yang penting bagi suatu perusahaan.

3.2.2 Informasi

Menurut Sutanta (2011), informasi merupakan sebuah hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi si penerima informasi. Menurut Gordon B.Davis (1991), informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian informasi adalah sebuah data yang telah diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan mempunyai arti.

3.2.3 Sistem Informasi

Menurut Winanti (2014) Sistem Informasi adalah kumpulan hardware dan software komputer, prosedur, dokumentasi, formulir dan orang yang bertanggungjawab untuk memperoleh, menggerakkan, manajemen, distribusi data dan informasi

3.2.4 Pengertian Sikeuda

Sistem informasi manajemen keuangan atau sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dan mengolah semua data keuangan menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Sistem informasi keuangan sering dibutuhkan dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam perusahaan, terutama masalah keuangan.

Undang-undang (UU) 32/2004 mengatur tentang otonomi daerah. Menurut UU ini, pengelolaan keuangan daerah akan diatur lebih lanjut dengan regulasi di bawahnya. Pengaturan lebih lanjut berupa Peraturan Pemerintah (PP) 58/2005 (sebagai petunjuk pelaksanaan) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13/2006 (sebagai petunjuk teknis). PP 58/2005 menyatakan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ditetapkan Kepala Daerah.

UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara memiliki lingkup yang lebih luas, karena pengertian perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD. UU ini, penatausahaan keuangan (daerah) diselenggarakan dengan akuntansi yang diarahkan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

UU 32/2004 dan UU 33/2004 menegaskan bahwa daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah (SIKEUDA). Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan atas pasal – pasal tersebut memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan SIKEUDA. UU 33/2004 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Mengenai sistem informasi keuangan daerah diatur agar supaya menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintah daerah.

Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang

digunakan untuk memecahkan masalah – masalah keuangan perusahaan. Sistem ini juga dilengkapi financial intelligence subsystem, yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang selanjutnya disebut SIMKeu adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), penyusunan anggaran (DIPA), penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAI) Sistem Informasi Keuangan

3.2.5 Manfaat Analisis Sikeuda

Manfaat yang dapat diperoleh dengan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIKEUDA) adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola manajemen data keuangan daerah dapat dilaksanakan lebih tertata rapih, terencana,transparan, efektif dan efisien.
2. Kualitas laporan keuangan yang dikerjakan terjamin kebenarannya dan mudah dipahami.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.6 Keunggulan Sikeuda

Keunggulan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIKEUDA) adalah :

1. Tidak perlu melakukan instalasi diberbagai perangkat komputer yang akan digunakan . proses instalasi hanya perlu dilakukan di server.
2. Aplikasis berbasis web yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun

3. Tidak diperlukan spesifikasi khusus untuk perangkat yang digunakan dalam mengakses website asalkan perangkat tersambung dengan jaringan internet.
4. Mempunyai metodologi dan sistematika penyusunan yang baik.
5. Cukup jelas, mudah dimengerti dan dipelajari.
6. Sesuai dengan format yang telah disetujui.
7. Mempertimbangkan aspek efisiensi dan penggunaan.
8. Dapat digunakan secara efektif untuk mendukung tugas- tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3.2.7 Teknologi yang digunakan Sikeuda

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan pada pemerintah daerah adalah:

1. Teknologi *Multiuser*, yaitu memungkinkan aplikasi dapat bekerja untuk banyak pengguna dengan kewenangan yang telah ditentukan oleh Administrator dan bekerja pada satu basis data yang sama (*collaboration*).
2. Teknologi *Client-Server*, yaitu aplikasi dapat dijalankan Client dengan sistem Basis Data yang berada pada komputer Server. Hal ini dimaksudkan apabila sistem dijalankan pada banyak pengguna yang bekerja bersama pada satu basis data.
3. Sistem aplikasi berbasis Web sehingga mendukung fleksibilitas serta kecepatan sinkronisasi antar pengguna.

4. Dapat diintegrasikan dengan Bank referensi yang dipilih oleh pemerintah Daerah.

3.2.8 Tahap yang diperlukan Pengisian Sikeuda

Didalam Aplikasi Sikeuda Terdiri beberapa modul didalamnya, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Modul Penatausahaan yang terdiri dari :

1. SPD yaitu Penerbitan Surat Penyediaan Dana
2. SPP yaitu Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
3. SPM yaitu Penerbitan Surat Permintaan Membayar
4. SP2D yaitu Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
5. SPJ yaitu Penerbitan Surat Pertanggungjawaban
6. Buku Pengeluaran
7. Laporan Akhir

3.3 Metode yang digunakan

Sikeuda Kemendagri merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah , dengan membasiskan pada teknologi *cloud computing*. Sikeuda mampu memfasilitasi proses kerja dan pengelolaan keuangan daerah secara nasional dan didalam menganalisis Dampak Penggunaan Sikeuda Terhadap Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup maka menggunakan metode melalui pengamatan langsung, wawancara, dan studi pustaka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasan

4.1.1 Dampak Penggunaan Sikeuda

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup laporan ini telah berhasil membuat sebuah hasil yang dapat dirasakan Divisi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup selama menggunakan Aplikasi / Web Sikeuda dalam mengelola data keuangannya sehingga dapat meminimalisir waktu dan dapat menghasilkan perhitungan yang tepat untuk jurnal pemasukan dan pengeluaran dari kas.

Adapun hasil wawancara yang saya dapatkan dari Ibu Dian Kus Aprilia S.E selaku Kabid Divisi Keuangan menyatakan bahwa “ Sebelum diberlakukannya penggunaan Sikeuda, Divisi keuangan lingkungan hidup menggunakan cara manual dalam mengerjakan laporan keuangannya artinya membuat laporan keuangan dengan menggunakan software seperti microsoft excel dengan menggunakan cara manual ini membutuhkan waktu dan tenaga serta ketelitian yang maksimal setiap bulannya.

Saat diberlakukannya penggunaan Sikeuda oleh pemerintah berdasarkan UU 32/2004 dan UU 33/2004 menegaskan bahwa daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah (SIKEUDA) maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mulai menggunakan Sikeuda dalam mengelola data keuangannya dan sekarang semakin mudah, dapat mempersingkat waktu yang

seharusnya bisa tiga hari dengan adanya sikeuda dapat menegriakannya dengan waktu satu hari saja sehingga pekerjaan juga bisa terselesaikan dengan hasil yang baik dan memuaskan selain itu dapat mempermudah penyampaiannya ke pemerintah daerah , dahulu harus diantarkan sekarang dengan Sikeuda semua data keuangan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup sudah secara otomatis di terima Pemerintah daerah. Namun disisi lain selain dampak positif yang dirasakan oleh Divisi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup, ada beberapa dampak negatif yang dirasakan Divisi Keuangan juga misalnya dalam melakukan tugas penginputan data keuangan yang tersedia setiap bulannya, divisi sering mengalami kesulitan untuk login atau bergabung dalam sikeuda ini dikarenakan jumlah instansi yang menggunakan applikasi / web sikeuda sendiri sangat besar jumlahnya dan penginputan data keuangan pun harus mengikuti jadwalnya yaitu seminggu sebelum tanggal akhir bulan, selain dari kekurangan sikeuda diatas sangat kurangnya waktu untuk memperbarui atau mengulang penginputan ketika divisi melakukan kesalahan dalam menginput data keuangannya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1x24 jam atau lebih untuk dapat menerima konfirmasi agar dapat melakukan penginputan ulang data keuangannya padahal laporan keuangan itu sendiri mempunyai waktu penerimaan laporan yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah.

Dan secara pengamatan saya sendiripun saya mengakui bahwasannya selama penggunaan Sikeuda ini berlangsung di Divisi Keuangan dari tahun 2019, sangat mempermudah karena hanya menggunakan beberapa alat bantu yang digunakan seperti Komputer/ Laptop, Data-data keuangan yang akan di input kedalam Aplikasi Sikeuda dengan ketelitian, kelugasan , dan ketepatan dalam

mengingat sehingga mengurangi terjadinya kesalahan yang fatal dan kualitas laporan yang di input tiap bulannya terjamin akan kebenarannya. Namun yang saya ketahui dari Bapak Mattelail Badrin selaku Bendahara Divisi keuangan “Ketika ada kesalahan dalam penginputan untuk perbaikan maka harus segera menghubungi pihak pusat agar dapat di perbarui ulang dalam penginputan dan waktu penerimaan jawaban dari pusat memakan waktu 1 x 24 jam atau bisa lebih .

4.2 Pembahasan

Seperti beberapa gambar yang saya sertakan adalah gambaran dalam penginputan data keuangan itu sendiri :



Gambar 4.1
Tampilan Awal



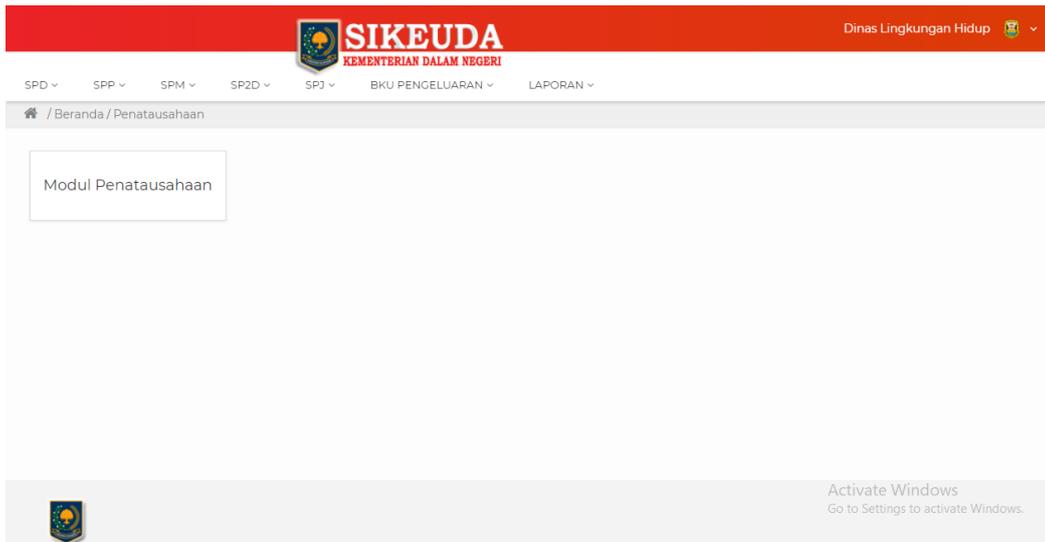
Gambar 4.2

Halaman Dashboard Login Sikeuda



Gambar 4.3

Beranda Aplikasi Sikeuda



Gambar 4.4
Isi Modul Penatausahaan



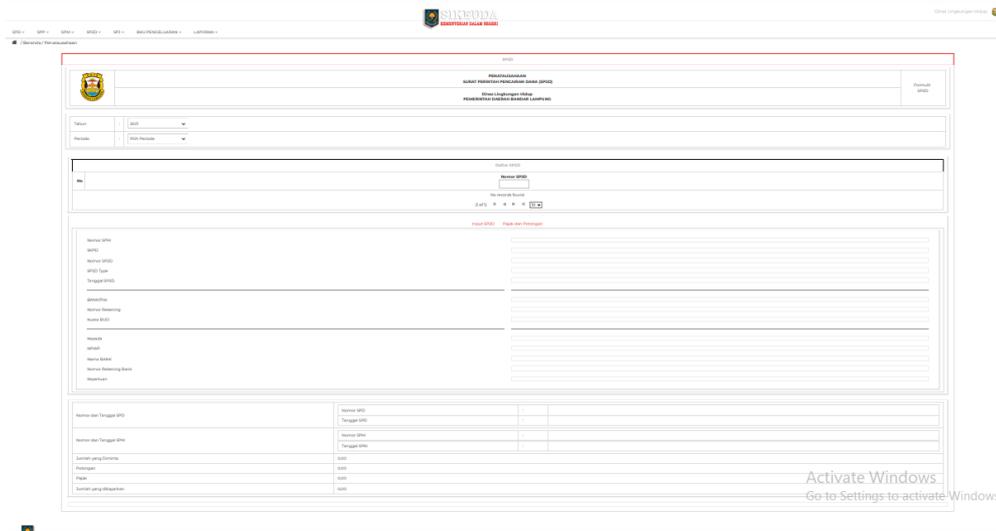
Gambar 4.5
Tampilan Pengisian SPD (Tahap 1)

Gambar 4.6

Tampilan Pengisian SPP (Tahap kedua)

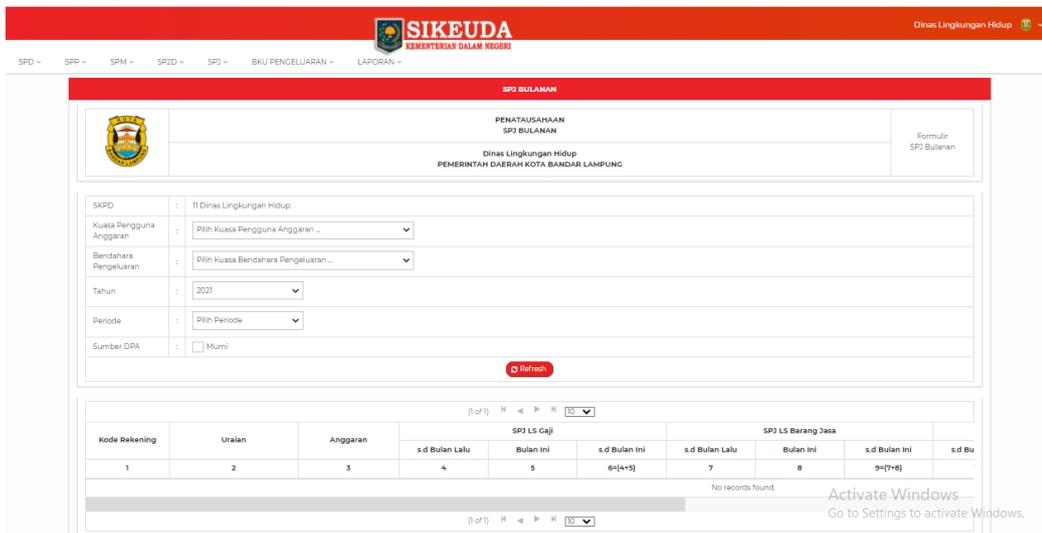
Gambar 4.7

Tampilan Pengisian SPM (Tahap ketiga)



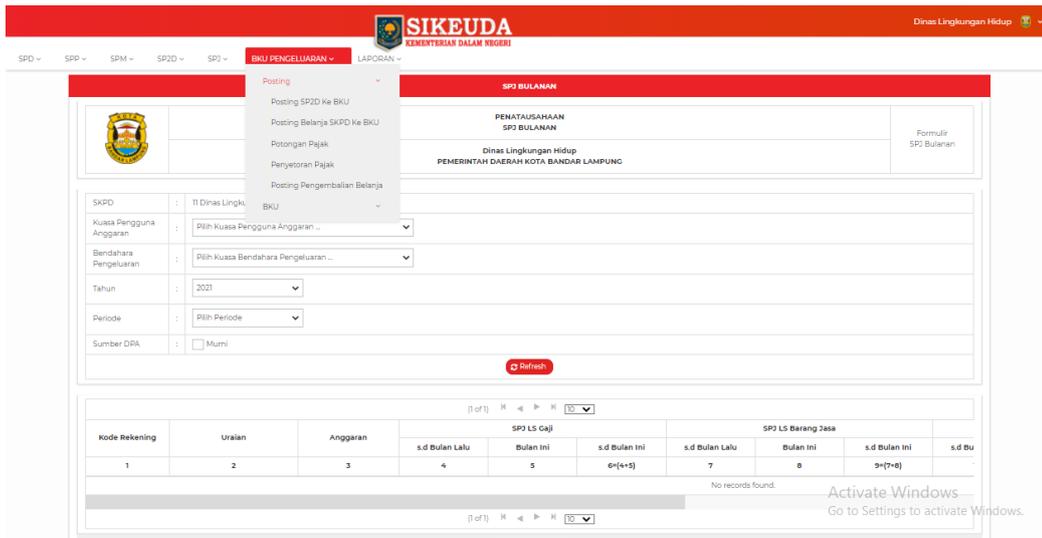
Gambar 4.8

Tampilan SP2D (Tahap keempat)



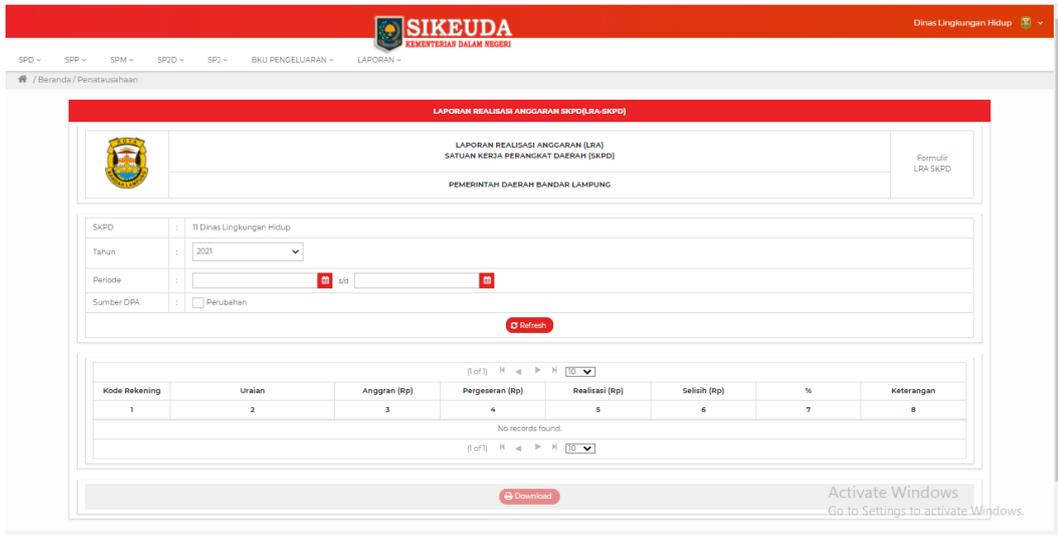
Gambar 4.9

Penatausahaan SPJ (Tahap ke lima)



Gambar 5.0

Mengisi Buku Pengeluaran (Tahap Keenam)



Gambar 5.1

Tampilan Laporan Akhir

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penggunaan yang telah dilaksanakan, laporan ini menarik kesimpulan bahwa Sikeuda sendiri mempunyai dampak positif dan negatifnya antara lain sebagai berikut :

- a. Dampak Positif : Dengan adanya penggunaan sistem ini dapat membantu divisi keuangan dalam meminimalisir waktu pengerjaan sebelumnya tiga hari menjadi satu hari, dan menghasilkan hasil yang tepat, dan dimasa pandemi Covid-19 ini dapat menghindari terpaparnya virus corona antara karyawan Dinas Lingkungan terhadap karyawan Pemerintah Daerah guna menaati peraturan dari Pemerintah Sosial.
- b. Dampak Negatif : Karena waktunya yang sudah ditentukan secara bersamaan setiap instansi wajib mengisi laporan atau memberikan hasil laporan sebelum akhir bulan, maka sering terjadinya kesusahaan dalam login aplikasi sikeuda , dan sangat sulit dalam menerima pembaruan sistem yang dikelola pemerintah daerah dalam penginputan ulang ketika terjadi kesalahan menginput data keuanganya.

5.2 Saran

Penggunaan Sikeuda (Sistem Informasi Keuangan Daerah) ini merupakan rancangan sistem yang sangat membantu bagi beberapa Divisi baik Instansi Pemerintahan maupun Perusahaan yang menggunakan Aplikasi Sikeuda.

Saran pribadi saya sendiri dalam masalah yang sering terjadi yaitu salah penginputan butuh waktu yang sangat lama untuk konfirmasi penginputan ulang kembali yang diterima dan sering terjadi kesulitan untuk bergabung atau masuk kedalam aplikasi tersebut Sangat di butuhkan bagi karyawan untuk informasi yang cepat agar dapat di kerjakan atau di lakukan penginputan ulang akan data data keuangan yang diperoleh instansi aupun perusahaan yang menggunakan aplikasi sikeuda , dan sebaiknya apabila pemerintah daerah dapat memberikan keringan waktu dalam pengerjaan dan penerimaan laporan keuangan per tiap bulannya mengingat sulitnya masuk ke aplikasi sikeuda karena banyaknya Instansi yang menggunakan aplikasi sikeuda itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Intermedia (G-Im) Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Sikeuda)
- Hutahaean (2015:2) Pengertian sistem Retrieved
- Kemendagri UU Nomor 32/2004 UU 33/2004 tentang penyelenggaraan Sikeuda
- Mulyadi. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Score Consulting, Workshop Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, (Hotel Ibis Jakarta: 25-27 Juni 2004)
- Sutanta. (2011). Sistem Informasi Manajemen Pada Basis Data.
- Winanti. (2014). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Di SMA Tamansiswa Sukabumi. JATI-Jurnal Teknologi dan Informasi UNIKOM, 1(6)